

# IMPLEMENTATION EVALUATION OF SAFETY AND HEALTH IN CONSTRUCTION SERVICES IN NORTH SULAWESI

by Pingkan Pratisa<sup>a</sup>, Ludfi Djakfar<sup>b</sup>, and M. Ruslin Anwar<sup>b</sup>

## ABSTRACT

*Implementation of OHS management system by construction companies in North Sulawesi has many problems. These problems are identified as inhibiting factors. This study aims to identify inhibiting factors that influence OHS implementation on construction company and how public policy alternatives that can be proposed. Product moment correlation analysis results showed overall effect of those factors, of which the most influential factor is budgetary project planning. Proposed Public policy are: procurement of equipment and materials budget should be included in Cost Expense Plan for construction works; monitoring mechanisms need to be regulated in order to create awareness OHS implementation, including governing authority to the field of OHS in related agencies. Similarly, the rules of reward and punishment to promote awareness of OHS implementation, OHS socialization also be performed periodically, with various forms and methods and direct guidance in the field, establishment of OHS tools and materials management unit.*

**KEYWORDS:** construction; implementation; inhibit; OHS; policy.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kecelakaan kerja pada proyek konstruksi menempati urutan tertinggi, yaitu sekitar 32% dari semua kecelakaan yang terjadi.<sup>1</sup> Dengan melihat besarnya tingkat kecelakaan kerja di dunia industri konstruksi tersebut, maka permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, lebih dikenal dengan nama (K3) perlu mendapat perhatian yang serius, karena jika diabaikan akan sangat berpengaruh pada kinerja suatu proyek.

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan dampak dari kecelakaan kerja tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa perundangan dan peraturan pemerintah turunannya, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. INST 05/M/RW/96 tanggal 28-10-1996 tentang Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Kerja Pada Kegiatan Konstruksi Bangunan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. KEP. 174/MEN/1986, No. 104/KPTS/1986, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Sekalipun undang-undang maupun peraturan pemerintah telah dikeluarkan dalam masalah keselamatan dan keamanan kerja, namun jumlah kecelakaan masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pengusaha di bidang jasa konstruksi yang belum melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Keengganan

tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Termasuk di dalamnya adalah masalah pengawasan di beberapa propinsi yang masih lemah.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk: 1) mengetahui faktor-faktor penghambat yang paling berpengaruh terhadap penerapan K3 pada perusahaan jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi utara, dan 2) memberikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam memahami akan faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3, penulis mendasarkan pada hasil dari beberapa peneliti sebelumnya. Cheah<sup>2</sup> mengidentifikasi bahwa faktor pertama yang mempengaruhi standar K3 adalah faktor pekerja yang melaksanakan pekerjaan fisik, kemudian diikuti faktor kontraktor dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan mengenai K3, ada juga faktor lainnya seperti faktor pengembang dan faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi adalah faktor peranan konsultan. Razuri, *et. al.*<sup>3</sup> menunjukkan bahwa kinerja keselamatan dipengaruhi oleh variabel orientasi dan pelatihan khusus keselamatan untuk tingkat manajemen, variabel perencanaan proyek dan praktek partisipatif. Sutjana<sup>4</sup> mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan baik kecil dan menengah di Propinsi Bali sebagai berikut: 1) Hasil yang dicapai dari penerapan K3 dan ergonomi baru dalam bentuk terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien, dan peningkatan produktivitas kerja, namun belum mampu menunjukkan keuntungan dalam bentuk uang, 2) Manajemen perusahaan masih memberikan prioritas rendah pada program ergonomi dan K3, 3) Program yang dilaksanakan lebih banyak program kuratif dibandingkan dengan program preventif dan promotif sehingga tampak sebagai pengeluaran saja, 4) Kurangnya pengetahuan manajemen dan karyawan mengenai ergonomi dan K3, 5) terbatasnya dana, dan 6) lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi oleh pemerintah. Rifandi<sup>5</sup> mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan K3 pada industri pertambangan adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan dana, 2) rendahnya budaya dan disiplin, dan 3) rendahnya pengetahuan mengenai K3. Adawiah<sup>6</sup> mengungkapkan

<sup>a</sup>Student of Construction Management, in the Department of Civil Engineering, Brawijaya University, Malang, Indonesia.

<sup>b</sup>Lecturer in the Department of Civil Engineering, Brawijaya University, Malang, Indonesia.

Note. The manuscript for this paper was submitted for review and possible publication on April 15, 2011. Discussion open until May 2012. This paper is part of the ITS Journal of Civil Engineering, Vol. 31, No. 1, May 2011. © ITS Journal of Civil Engineering, ISSN 2086-1206/2011.

**Tabel 1.** Jumlah Sampel Penelitian

No	Grade Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sampel
1	5	90	74
2	6	13	13
3	7	3	3
Jumlah		106	90

**Tabel 2.** Variabel Penelitian

No	Variabel	Keterangan
1	X1	Perencanaan anggaran proyek
2	X2	Frekuensi sosialisasi K3 dari pemerintah
3	X3	Pengawasan dan sangsi
4	X4	Tingkat kerumitan desain proyek
5	X5	Ketersediaan peralatan K3
6	X6	Budaya pekerja di lapangan
7	X7	Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan

Sumber: hasil identifikasi dari penelitian terdahulu

**Tabel 3.** Hasil Analisis Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi (r hitung)
X1	0.532
X3	0.473
X2	0.458
X6	0.425
X7	0.302
X4	0.242
X5	0.223

Di urutkan dari yang paling besar korelasinya

bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3 juga disebabkan antara lain: 1) alokasi dana untuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat terbatas, 2) terbatasnya tenaga pengawas di perusahaan, dan 3) tidak adanya sanksi dari perusahaan terhadap tenaga kerja perempuan yang tidak mentaati penggunaan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja.

Permasalahan terkait dengan penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan industri konstruksi juga ditengarai terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mempertimbangkan bahwa sektor industri konstruksi di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan daerah, maka masalah K3 perlu mendapatkan perhatian. Penelitian ini berupaya untuk melakukan kajian sejauh mana permasalahan K3 telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara.

### SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Kajian akan permasalahan implementasi K3 sektor industri telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar kajian tersebut dilakukan pada industri pertambangan dan manufaktur, dengan lingkup pada sisi manajemennya. Studi pada implementasi K3 dalam industri konstruksi dengan melihat langsung dari faktor-faktor penghambatnya, yang selanjutnya dijadikan faktor utama dalam memberikan alternatif kebijakan publik sangat langka dalam literatur teknis. Penulis percaya bahwa studi yang berhubungan dengan faktor-faktor penghambat dalam implementasi K3 dengan

pemecahan masalah melalui analisis kebijakan publik dilakukan untuk pertama kalinya dan akan sangat bermanfaat untuk manajemen konstruksi dan proyek.

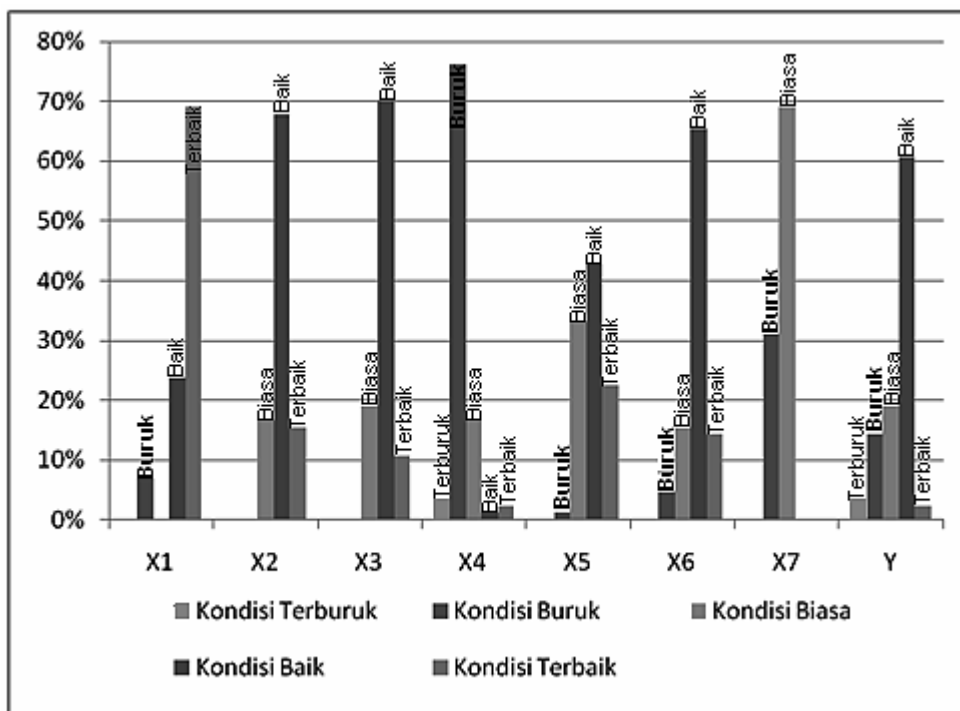
### METODE PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan rancangan (*design*) penelitian *explanatory* (penjelasan). Selanjutnya untuk mengkaji dan merumuskan alternatif kebijakan publik dalam penerapan K3 di Propinsi Sulawesi Utara, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif yang berupaya untuk menghimpun berbagai data dan informasi, mendeskripsikan dan menganalisis fakta di lapangan.

### POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi yang beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan kualifikasi Grade 5, 6 dan 7 yang terdaftar pada organisasi GAPENSI Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010. Pemilihan populasi tersebut dengan asumsi bahwa yang berhak menerapkan K3 adalah perusahaan pada grade tersebut. Berdasarkan data dari GAPENSI, terdapat sebanyak 106 perusahaan yang memenuhi kriteria di atas.

Sampel penelitian diambil dari populasi di atas secara representatif. Dengan melihat jumlah perusahaan



Gambar 1. Distribusi frekuensi dari hasil kuesioner

yang tersedia, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

#### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap penerapan K3. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara diidentifikasi dan menjadi variabel penelitian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Ketujuh variabel di atas merupakan variabel bebas (X), sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari responden, maka disusunlah kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan disiapkan untuk mendapatkan persepsi responden terkait dengan permasalahan hambatan dalam penerapan keselamatan kerja. Kuesioner disusun dengan menggunakan Skala Likert, yaitu skala pengukuran dengan nilai antara 1 – 5, dimana 1 = kondisi terburuk, 2 = kondisi buruk, 3 = kondisi biasa, 4 = kondisi baik, dan 5 = kondisi terbaik.

#### Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis dari data yang terkumpul, maka dilakukan dengan bantuan software SPSS. Hasil dari analisis kuantitatif selanjutnya dijadikan input dalam analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan metode analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threat*). Berdasarkan hasil kajian SWOT dapat kemudian dirumuskan alternatif kebijakan penerapan K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Responden Terhadap Permasalahan

Dari hasil penyebaran 90 kuesioner, 84 berhasil kembali, dan hanya 6 responden tidak mengembalikan kuesioner. Kuesioner tersebut sebagian besar dijawab/diisi oleh direktur perusahaan jasa konstruksi dan sebagian lagi diisi oleh staff senior. Dari 84 kuesioner yang dikembalikan, distribusi frekuensinya ditampilkan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1, maka dapat diinterpretasikan bahwa responden mempersepsikan kondisi sebagai berikut:

- Pada variabel Perencanaan Anggaran Proyek (X1), umumnya responden mempersepsikan kondisi terbaik dari kondisi yang ditanyakan. Artinya variabel ini sangat menghambat dalam penerapan K3.
- Pada variabel Frekuensi sosialisasi K3 dari pemerintah (X2), umumnya responden mempersepsikan kondisi cukup baik dari kondisi yang ditanyakan. Artinya mereka merasa bahwa pemerintah belum maksimal melakukan sosialisasi dengan baik dan mereka menyadarinya.
- Pada variabel Pengawasan dan sangsi (X3), umumnya responden mempersepsikan kondisi cukup baik dari kondisi yang ditanyakan. Artinya mereka merasa bahwa pemerintah belum maksimal melakukan pengawasan dengan baik dan memberikan sangsi bagi yang tidak mentaatinya.
- Pada variabel Tingkat kerumitan desain proyek (X4), umumnya responden mempersepsikan kondisi buruk dari kondisi yang ditanyakan. Artinya, tingkat kerumitan disain proyek menghalangi mereka untuk mengimplementasikan K3.

- Pada variabel Ketersediaan peralatan K3 (X5), umumnya responden mempersepsikan kondisi agak baik dari kondisi yang ditanyakan. Hal ini dapat dilihat dimana responden umumnya menjawab biasa dan baik. Artinya, bahwa ditinjau dari aspek ketersediaan peralatan, sebagian dari mereka menyiapkan peralatan K3 untuk pekerja.
- Pada variabel Budaya pekerja di lapangan (X6), umumnya responden mempersepsikan kondisi baik dari kondisi yang ditanyakan. Artinya, bahwa pekerja belum cukup mempunyai kesadaran untuk melakukan pekerjaannya berdasarkan prosedur keselamatan.
- Pada variabel Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7), umumnya responden mempersepsikan kondisi yang ada saat ini adalah biasa saja. Artinya, bahwa mereka belum terlalu terbiasa dengan perencanaan strategis dan bagaimana melakukan prioritas bagi kepentingan perusahaan.

### Analisis Korelasi

Analisis korelasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara perencanaan anggaran proyek (X1), frekuensi Sosialisasi K3 dari pemerintah (X2), pengawasan dan sanksi (X3), tingkat kerumitan desain proyek (X4), ketersediaan peralatan K3 (X5), budaya pekerja di lapangan (X6), perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7) terhadap penerapan K3 (Y). Dengan analisis *product moment* menggunakan SPSS, maka analisis korelasi dari masing-masing variabel tersebut dapat dihitung.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam penerapan K3 di Propinsi Sulawesi Utara adalah faktor perencanaan anggaran (X1), kemudian diikuti oleh pengawasan dan sanksi (X3), frekuensi sosialisasi dari pemerintah (X2), budaya pekerja di lapangan (X6), sedangkan perencanaan strategis dan prioritas perusahaan (X7), tingkat kerumitan desain proyek (X4), dan faktor ketersediaan peralatan K3 (X5) adalah faktor-faktor penghambat yang pengaruhnya lemah dalam penerapan K3.

### Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisis korelasi terhadap faktor-faktor penghambat, hasil dari survey wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dalam rangka mendapatkan masukan untuk *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*. Dari hasil analisis korelasi didapatkan bahwa keseluruhan faktor-faktor dimaksud berpengaruh terhadap penerapan K3 pada jasa konstruksi di Sulawesi Utara. Dari hasil identifikasi *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*, selanjutnya dirumuskan berbagai strategi sesuai prosedur dalam analisis SWOT. Strategi-strategi ini dapat dilihat dalam matrik SWOT sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Rumusan Berbagai Strategi Sesuai Prosedur Melalui Analisis Matrik SWOT Kearns

	<u>Opportunities (P)</u>	<u>Threats (A)</u>
<b>Eksternal</b>	1) UU, PP, Kepber Menaker dan Men PU, Keputusan dan Peraturan Menaker, Keputusan dan Peraturan Men PU yang berkaitan dengan K3.	1) Tidak ada perencanaan anggaran pelaksanaan K3. 2) Frekuensi sosialisasi K3 yang sangat rendah dari pemerintah. 3) Tidak dilakukan pengawasan dan <i>punishment</i> . 4) Tingkat kerumitan desain struktur bangunan dan tapak proyek.
<b>Internal</b>	2) Pengetahuan K3 aparat Pemprov Sulut memadai. 3) Adanya Bidang K3 pada Disnakertrans Prop. Sulut. 4) Tekanan publik dari pemerhati K3, LSM, organisasi buruh, serta media. 5) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang terus meningkat.	5) Ketersediaan peralatan K3 yang sangat kurang. 6) Implementasi K3 bukan menjadi salah satu prioritas pembangunan ketenagakerjaan oleh Pemprov Sulut.
<u>Strengths (K)</u>	STRATEGI <i>Strengths-Opportunities</i>	STRATEGI <i>Strengths-Threats</i>
1) Rata-rata para direksi dan manajer perusahaan telah mengetahui dan memahami K3.	1) Pimpin perusahaan jasa konstruksi yang tahu dan paham akan K3 serta ketakutan jika perusahaannya didaftarhitamkan ( <i>black list</i> ) merupakan kekuatan untuk menerapkan K3 sebagaimana telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dengan dukungan peluang yaitu pendampingan dari aparat Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang mengetahui dan memahami K3, tekanan dari organisasi pengamat dan pemerhati masalah-masalah K3 termasuk media massa, adanya pembinaan dari Bidang K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara yang sangat berwenang dalam perencanaan, pengawasan dan pembinaan K3, serta pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang terus meningkat baik jumlah maupun besar/tinggi. (K1,2 ; P1,2,3,4,5).	Pimpinan perusahaan jasa konstruksi yang tahu dan paham akan K3 serta ketakutan jika perusahaannya didaftarhitamkan ( <i>black list</i> ) merupakan kekuatan untuk tidak diimplementasikannya K3 oleh karena tidak adanya perencanaan anggaran dalam RAB setiap pekerjaan konstruksi, rendahnya frekuensi sosialisasi dari pemerintah, tidak dilakukannya pengawasan dan <i>punishment</i> , rumitnya desain struktur bangunan dan tapak proyek, kurangnya peralatan dan bahan K3, serta tidak diprioritaskannya K3 dalam pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Utara. (K1,2 ; A1,2,3,4,5,6).
2) Ketakutan perusahaan untuk di- <i>black list</i> jika tidak melaksanakan K3 yang telah dianggarkan .		

<u>Weaknesses (L)</u>	STRATEGI Weaknesses- Opportunities	STRATEGI Weaknesses- Threats		infrastruktur dan bangunan gedung yang terus meningkat baik jumlah maupun besar/tinggi. (L2,4,5 ; P2,3,4,5).	
<p>1) Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan yang tidak mengutamakan keselamatan &amp; kesehatan pekerja bangunan.</p> <p>2) Budaya pekerja konstruksi yang tidak mempedulikan keselamatan &amp; kesehatan diri dalam bekerja.</p> <p>3) Tidak adanya unit struktural dalam perusahaan yang membidangi K3.</p> <p>4) Perusahaan tidak memiliki tenaga ahli K3.</p> <p>5) Tidak adanya mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari perusahaan kepada pekerja yang peduli K3.</p>	<p>1. Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan yang tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja bangunan dan tidak adanya unit struktural dalam perusahaan yang membidangi K3 sehingga penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi tidak dilakukan dapat dipacu dengan adanya peraturan-perundang-undangan terkait, pendampingan dari aparat pemerintah yang tahu dan paham mengenai K3 serta adanya pembinaan dari Bidang K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara. (L1,3 ; P1,2,3).</p> <p>2. Budaya pekerja yang tidak mempedulikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja di lapangan, tidak dimilikinya tenaga ahli K3, serta tidak adanya mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari perusahaan kepada pekerja yang peduli akan K3 dapat diubah sehingga penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi dilakukan dengan adanya dukungan peluang pendampingan dari aparat pemerintah yang tahu dan paham mengenai K3, pembinaan dari Bidang K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara, tekanan dari organisasi buruh, pengamat dan pemerhati masalah-masalah K3 termasuk media massa serta pembangunan</p>	<p>1. Perencanaan strategis dan prioritas perusahaan yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja bangunan dan adanya unit struktural dalam perusahaan yang membidangi K3 dapat merupakan peningkatan organisasi perusahaan untuk memperkecil ancaman tidak diterapkannya K3 di pekerjaan konstruksi oleh karena tidak adanya perencanaan anggaran untuk pelaksanaan K3 dari pihak pemilik proyek, kekurangan peralatan K3, serta implementasi K3 yang bukan salah satu prioritas pembangunan ketenagakerjaan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. (L1,3 ; P1,5,6).</p> <p>2. Perubahan budaya pekerja untuk mempedulikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja di lapangan, menyediakan tenaga ahli K3, serta mengadakan mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari perusahaan kepada pekerja yang peduli akan K3 merupakan perubahan kelemahan untuk memperkecil ancaman frekuensi sosialisasi K3 yang sangat rendah dari pemerintah, pengawasan dan <i>punishment</i> yang hampir tidak dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, tingkat kerumitan desain struktur bangunan dan tapak proyek, serta ketersediaan peralatan K3 yang sangat kurang. (L2,4,5 ; P2,3,4,5).</p>			

Matriks Kearns di atas menampilkan delapan kotak, yang dibagi sesuai fungsi yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal peluang dan ancaman (*opportunity dan threat*), sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal kekuatan dan kelemahan (*strength dan weakness*). Sementara empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai titik hasil pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Usulan kebijakan implementasi K3 pada pekerjaan konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara yang dapat dirumuskan sebagai alternatif kebijakan yang paling mungkin dan ideal untuk dilaksanakan, berdasar pada isu-isu strategis yang telah diperoleh dari analisis SWOT, sementara skala atau tingkat prioritas dalam mengatasi hambatan penerapan K3 pada pekerjaan konstruksi didasarkan dari hasil analisis korelasi. Dukungan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi juga menjadi dasar dalam melakukan analisis kebijakan publik ini.

Kebijakan publik urusan keselamatan dan kesehatan kerja pada jasa konstruksi di Sulawesi Utara mencakup peningkatan komitmen baik dari pemerintah, pengguna jasa konstruksi, maupun dari penyedia jasa konstruksi, penguatan koordinasi dan regulasi, dan pemberdayaan dari pihak-pihak yang terkait yang dapat meningkatkan kepedulian akan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi pekerjaan konstruksi. Lebih lanjut Soehatman<sup>7</sup> mengatakan bahwa penentuan strategi dan tujuan dari kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

## PEMBAHASAN

Selama ini, implementasi K3 di Propinsi Sulawesi Utara belum optimal, terlebih pada bidang jasa konstruksi. Hal ini disebabkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara belum memberi prioritas terhadap optimalisasi implementasi K3 dalam pembangunan ketenagakerjaan, serta belum mempunyai Perda yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada jasa konstruksi. Bahkan, informasi dari Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara, hingga kini belum ada Perda mengenai K3 untuk sektor manapun. Dinas ini masih menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan/keputusan menteri tenaga kerja, yang secara umum berlaku di seluruh Indonesia. Untuk itulah perlu dirumuskan kebijakan publik mengenai implementasi K3 di propinsi ini, sebagai bahan masukan dalam pembuatan Perda atau pedoman pelaksanaan K3 pada jasa konstruksi.

Alternatif kebijakan publik yang dapat diusulkan dalam rangka mengoptimalkan implementasi K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anggaran pengadaan alat dan bahan K3 perlu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) setiap pekerjaan konstruksi, dan disesuaikan dengan nilai fisik pekerjaan, tingkat kerumitan bangunan dan tapak proyek. Pelaksana pekerjaan konstruksi atau yang disebut penyedia jasa konstruksi pasti akan melaksanakan pengadaan ini karena telah tercantum dalam RAB dan harus dipertanggung-jawabkan. Di sisi lain, anggaran biaya pekerjaan akan bertambah dan menjadi beban keuangan daerah atau keuangan penyedia jasa konstruksi, juga akan terjadi penumpukan alat dan bahan K3 pada pengguna jasa konstruksi, yang dapat menambah beban penganggaran untuk biaya perawatan dan penyimpanan.
- 2) Sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari lokakarya, workshop, dan diseminasi melalui media poster, banner, leaflet, booklet, radio, koran, televisi, serta pengarahannya langsung di lapangan. Sosialisasi ini diusahakan bersifat kampanye penyadaran dan bukan doktrinasi atau pengajaran, dengan sasaran utama adalah direksi, manajer, supervisor, dan pekerja lapangan. Dengan frekuensi yang tinggi, bentuk yang beragam dan ditindaklanjuti dengan pendampingan yang intensif, pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya K3 pada jasa konstruksi akan meningkat dan terus diingat, dan jika hal ini dilakukan dalam frekuensi yang tinggi maka akan menjadi kebiasaan sehingga kemudian menjadi budaya individu atau pekerja dan bahkan budaya organisasi perusahaan jasa konstruksi, termasuk memprioritaskan penerapan K3 dalam perencanaan strategis dan prioritas perusahaan, membuat bagian atau departemen yang menangani K3, dan menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang K3, serta memberi peringatan bagi pekerja yang tidak memperdulikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja di lapangan, juga sebaliknya memberi penghargaan bagi pekerja yang peduli akan K3 di lapangan. Konsekuensinya, pemerintah harus memberikan anggaran lebih kepada SKPD yang membidangi K3 dan SKPD yang rutin mengadakan pekerjaan konstruksi untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan, juga kepada lembaga swadaya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.
- 3) Pengadaan alat dan bahan K3 untuk setiap pekerjaan konstruksi diperlukan untuk menjamin ketersediaannya pada saat pelaksanaan pekerjaan, namun hal ini dapat mengakibatkan penumpukan dan kelebihan pada waktu-waktu tertentu, jika dilakukan melalui mekanisme pembelian. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah sebaiknya membentuk unit pengelola alat dan bahan K3, agar supaya penyedia jasa konstruksi dapat menyewa dan atau membeli peralatan dan bahan K3. Unit ini dapat bersifat struktural, fungsional, atau badan usaha milik daerah (BUMD). Jika unit pengelola berada dalam struktur hirarki pemerintah, maka unit ini dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas/badan (UPTD/B), yang sebaiknya berada dalam Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara. Modal

berupa peralatan dan bahan menjadi tanggungan APBD. Pendapatan dari adanya pembelian dan atau penyewaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun bentuk unit juga memiliki kelemahan yaitu: a) rawan korupsi atau penyelewengan hasil pembelian dan atau penyewaan; b) pengadaan alat dan bahan K3 sebagai modal memakan waktu yang lama, karena mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang memakan waktu hampir satu tahun; dan c) pelayanan publik sebagai pelanggan tidak maksimal, karena harus menyesuaikan dengan mekanisme birokrasi yang panjang. Jika unit pengelola ini bersifat fungsional, dapat berupa panitia pengelola. Panitia pengelola ini dapat berada pada setiap SKPD yang memiliki banyak pekerjaan konstruksi, dimana dasar hukum panitia dalam bekerja cukup dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala SKPD dimana panitia itu dibentuk. Pengguna dalam hal ini pembeli atau penyewa peralatan dan bahan K3 dapat dengan cepat mendapatkan barang tersebut dengan mekanisme yang sangat singkat. Namun kekurangan dengan bentuk kepanitiaan ini adalah: a) personil panitia dapat sewaktu-waktu diganti atau dibubarkan, karena hanya dengan SK Kepala SKPD pada masa tertentu, dan bila terjadi pergantian maka terjadi pula pembuatan kebijakan yang baru; b) dapat terjadi kekurangan alat dan bahan K3 karena anggaran yang sangat kecil yaitu bagian dari DPA SKPD dimana panitia tersebut berada; c) rawan korupsi atau penyelewengan hasil pembelian dan atau penyewaan; dan d) hasil beli dan sewa tidak akan dimasukan dalam Kas Daerah sebagai PAD, namun hanya dimasukan dalam Kas Panitia. Jika unit pengelolaan peralatan dan bahan K3 dalam bentuk BUMD dijadikan opsi maka pengelolaan tersebut dilakukan mengikuti sistem perusahaan profesional. Hal ini mungkin lebih baik jika dibandingkan dengan kedua bentuk unit pengelola sebelumnya karena intervensi pemerintah dan birokrasi tidak ada lagi serta mekanisme jual – beli atau sewa menyewa dapat dilakukan dengan sistem administrasi bisnis. Mekanisme pengadaan juga tidak bertele-tele dan memakan waktu yang lama, karena dapat diadakan secepatnya sesuai kebutuhan permintaan. Walaupun modal tetap bersumber pada APBD namun dengan sistem persero, dengan beberapa pemegang saham, dimana komisaris utama tetap dipegang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Sekretaris Propinsi, maka wajib untuk berorientasi mendapatkan keuntungan yang harus dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham.

- 4) Mekanisme pengawasan perlu untuk diatur agar tercipta kesadaran dalam implementasi K3 di lapangan. Demikian pula pola *reward* dan *punishment* untuk menggalakan kepedulian implementasi K3 baik secara organisasi maupun individu. Bidang yang membidangi K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara perlu diberikan wewenang yang besar dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi perusahaan dan pekerja konstruksi apabila tidak mengindahkan

peringatan untuk mengimplementasikan K3 pada pekerjaan mereka, walaupun pekerjaan tersebut berada dalam kendali SKPD yang lain. Disamping itu, bidang dimaksud perlu juga melakukan penilaian dan memberikan penghargaan bagi perusahaan atau pekerja yang selalu mempedulikan keselamatan dan kesehatan mereka. Penghargaan ini harus dirancang sedemikian rupa, prestisius dan harus diserahkan oleh kepala daerah atau wakilnya (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota), agar penerima penghargaan dapat terus termotivasi dan memotivasi orang lain yang seprofesi untuk mempedulikan K3 dalam pekerjaan mereka. Pengawasan, *reward* dan *punishment* akan dapat dilakukan apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah memberi prioritas yang utama pada SMK3 bidang konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara.

Keseluruhan usulan alternatif kebijakan seperti diuraikan sebelumnya, harus dirancang untuk menghasilkan Peraturan Daerah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, dimana pada jasa konstruksi tersirat di dalamnya, atau secara khusus dibuat untuk bidang konstruksi, yang dapat digunakan oleh semua pihak dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di Propinsi Sulawesi Utara. Disamping Perda, perlu juga disusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

#### PENELITIAN LEBIH LANJUT

Keinginan untuk melakukan evaluasi implementasi K3 pada unsur pekerja konstruksi yang melakukan pekerjaan fisik, dan upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui cara yang mungkin dalam rangka meningkatkan kebiasaan menggunakan peralatan K3 selama berada di lokasi pekerjaan. Hasil studi tersebut, akan menguntungkan industri konstruksi secara jangka panjang.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah: Faktor Perencanaan Anggaran (X1) kemudian diikuti oleh Faktor Pengawasan Dan samsi (X3), Faktor Frekuensi Sosialisasi Dari Pemerintah (X2), Faktor Budaya Pekerja Dilapangan (X6), Sedangkan Faktor Perencanaan Strategis Dan Prioritas Perusahaan (X7), Faktor Tingkat Kerumitan Desain Proyek (X4), Faktor Ketersediaan Peralatan K3 (X5) adalah faktor penghambat yang pengaruhnya lemah dalam penerapan K3.
- 2) Alternatif kebijakan publik yang dapat diusulkan dalam upaya peningkatan penerapan K3 pada jasa konstruksi di Propinsi Sulawesi Utara:
  - a) Anggaran pengadaan alat dan bahan perlu dimasukkan dalam RAB setiap pekerjaan konstruksi dan disesuaikan dengan nilai fisik pekerjaan, tingkat kerumitan bangunan dan tapak proyek.

- b) Mekanisme pengawasan perlu untuk diatur agar tercipta kesadaran dalam implementasi K3 dilapangan. Demikian pula pola *reward* dan *punishment* untuk menggalakkan kepedulian implementasi K3 baik secara organisasi maupun individu. Bidang yang membidangi K3 pada Disnakertrans Propinsi Sulawesi Utara perlu diberikan wewenang yang besar dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi bagi perusahaan dan pekerja konstruksi apabila tidak mengindahkan peringatan untuk mengimplementasikan K3 pada pekerjaan mereka.
- c) Sosialisasi K3 perlu dilaksanakan secara berkala, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari lokakarya, workshop dan diseminasi melalui media poster, banner, leaflet, booklet, radio, koran televisi serta pengarahannya langsung dilapangan. Dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, bentuk beragam dan ditindaklanjuti dengan pendampingan yang intensif.
- d) Pemerintah daerah sebaiknya membentuk unit pengelola alat dan bahan K3, agar supaya penyedia jasa konstruksi dapat menyewa dan atau membeli peralatan dan bahan K3. Unit ini dapat bersifat struktural, fungsional atau badan usaha milik daerah (BUMD).

#### LAMPIRAN

Singkatan-singkatan yang digunakan dalam paper:

APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
DISNAKERTRANS	= Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DPA	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran
K3	= Keselamatan dan Kesehatan kerja
OHS	= Occupational Health And Safety
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
RAB	= Rencana Anggaran Biaya
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMK3	= Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

#### REFERENSI

1. Fitriana, R. (2010). Usaha Konstruksi Diminta Perhatikan Pekerja, Berita dan Peristiwa Jamsostek, [www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087](http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087), diakses: 18-11-10.
2. Cheah, C. (2007). *Construction Safety and Health Factors at the Industry Level: The Case Of*

- Singapore, *Journal of Construction in Developing Countries*, Vol. 12, No. 2, 2007, p81-99, Universiti Sains Malaysia.
3. Razuri, C., Luis F. Alarcón and Sven Diethelm. (2007). *Evaluating The Effectiveness of Safety Management Practices and Strategies in Construction Projects*, Proceedings IGLC-15, July 2007, Michigan, USA, p271-281.
  4. Sutjana, IP. (2006). Hambatan Dalam Penerapan K3 Dan Ergonomi Di Perusahaan, Makalah, Seminar Ergonomi dan K3 tanggal 29 Juli 2006, Surabaya.
  5. Rifandy, A. (2010). Pengelolaan K3 Pada Industri Pertambangan, Forum Bebas Indonesia, [www.forumbebas.com/forum-139-page-1.html](http://www.forumbebas.com/forum-139-page-1.html), diakses: 01-12-10.
  6. Adawiah, R., Mardiyono, M. Irfan Islamy. (2010). *Work Protection for Female Labors (A Study on the Implementation of the Policy of Job Safety and Health at the PT. Sarikaya Sega Utama in Banjarbaru, South Kalimantan)*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
  7. Soehatman R. (2010). Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001, Penerbit PT Dian Rakyat, Jakarta.
  8. BPS. (2010). Sulut Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
  10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
  11. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.